BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Makna penting pemilu itu sendiri bagi Negara yang menganut sistem demokrasi adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut. Pemilihan umum adalah wadah yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka baik itu di lembaga eksekutif atau lembaga legislatif. Untuk merealisasikan pelaksanaan pemilihan umum maka dibuatlah Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, yang mana dalam Undang-undang ini mengatur asas, pelaksanaan dan lembaga penyelenggaraan pemilu, peserta dan persyaratan dalam mengikuti pemilu, serta peraturan mengenai hak-hak untuk memilih. Disamping itu, dalam Undang-undang ini juga membahas mengenai jumlah kursi dan daerah pemilihan

¹Sekretariat Jenderal DPR RI Biro Humas dan Pemberitaan. *Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 2011, hal-5

_

anggota DPR, penyusunan daftar pemilih dan dan bagaimana pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota.²

Pada Undang-undang No.10 Tahun 2008 diharapkan dapat terwujudlah pelaksanaan pemilihan umum yang proposional dan dengan mekanisme pemilihan yang baik, yang mana setiap orang berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ataupun memilih baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dalam menciptakan pemilihan yang proposional antara laki-laki dengan perempuan maka Pemerintah dengan Undang-undang No.10 Tahun 2008 telah mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik seperti yang dituliskan dalam pasal 53 sampai pasal 58 menyatakan bahwa penentuan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan sebanyak minimal 30% dan dilakukan melalui *zipper system* atau *zig zag*. Caleg perempuan ditempatkan dalam daftar caleg dengan komposisi 1 diantara 3 nama,atau setiap 3 nama yang ada terdapat 1 nama caleg perempuan.³

Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan dalam pasal 53 sampai pasal 58 ini saat ini telah diterapkan, maka telah membuka peluang bagi setiap perempuan untuk dapat ikut serta dalam pencalonan diri sebagai wakil rakyat. Walaupun perempuan telah diberikan peluang dalam pencalonan namun belum berarti perempuan secara pasti dapat terpilih sebagai anggota legislatif secara proposional. Sebab dalam memenangkan seorang wakil rakyat juga ada ketentuan-

² Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

³ Ibid. Pasal 53-58.

ketentuan yang harus dilalui. Penetapan caleg terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, jadi persaingan antara perempuan dan laki-laki sangatlah kuat. Pemenang caleg dapat dipilih berdasarkan figuritas serta strategi politik yang digunakan sehingga dapat mempengaruhi suara mereka.

Di Indonesia perwakilan perempuan di lembaga legislatif masih terbilang sedikit. Disetiap pemilihan legislatif caleg laki-laki lebih banyak mendominasi sebagai anggota legislatif dari pada caleg perempuan. Padahal saat ini dapat dikatakan keikutsertaan perempuan dalam pemilihan legislatif sudah meningkat namun pada hasilnya masih banyak juga caleg perempuan yang tidak terpilih. Hal ini terlihat dari beberapa survey, salah satunya survey yang dilakukan oleh IFES dan LSI yang menyatakan bahwa angka proporsi anggota DPR perempuan hanya 18%. Lembaga survei tersebut mendapatkan hasil bahwasanya caleg perempuan didukung tapi tidak dipilih oleh masyarakat. Tentu fenomena ini sangat disayangkan sekali, mengingat perwakilan perempuan juga penting didalam politik.

Tabel 1.1
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat
Periode 2009/2014 dan 2014/2019

No.	DPRD	Tahun 2009			Tahun 2014				
		Perempuan terpilih	Kursi	%	Perempuan terpilih	Kursi	%	Keterangan	
1	Provinsi Sumbar	7	55	12,7	6	65	9.2	Turun	
2 3	Kota Padang Kota Padang	3 3	45 35	6.7 8.6	7 2	45 40	15.5 5	Naik Turun	

⁴DetikNews. *Caleg Perempuan Didukung Tapi Tak Dipilih*, dalam http://news.detik.com/read, pada tanggal 23 April 2015, pukul 15.00 WIB

-

	Pariaman							
4	Kota Pariaman	2	20	10	1	20	5	Turun
5	Kota Padang Panjang	4	20	20	4	20	20	Sama
6	Kab.Tanah Datar	3	35	8.6	3	35	8.6	Sama
7 8	Kab. Agam Kota Bukit Tinggi	3 4	40 25	7.5 16	1 2	45 25	2.2 8	Turun Turun
9	Kab.Pasaman Barat	1	35	2.8	1	40	2.5	Sama
10	Kab.Pasaman	1	30	3.3	2	35	5.7	Naik
11	Kota Payakumbuh	2	25	8	2	25	8	Sama
12	Kab.Lima Puluh	2	- 35 - 35	S 577 A 9	SANDAL	35	11.4	Naik
13	Kota Kab.Pesisir Selatan	0 U	NIVER 40	0	3	AS 45	6.7	Naik
14	Kab. Mentawai	0	20	0	0	20	0	Sama
15	Kota Solok	2	20	10	1	20	5	Turun
16	Kab.Solok	1	35	2.8	3	35	8.6	Naik
17	Kab. Solok Selatan	2	25	8	0	25	0	Turun
18	Kota Sawahlunto	4	20	20	4	20	20	Sama
19	Kab. Dharmasraya	1	25	4	1	25	4	Sama
20	Kab. Sijunjung	2	25	8	3	30	10	Naik
	Jumlah	47	545	8.6	49	585	8.4	Turun

Sumber: www.ranahberita.com

Berdasarkan tabel di atas fenomena di Sumatera Barat juga menunjukan bahwa perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di wilayah-wilayah Kota atau Kabupaten tidak sebanding dengan jumlah laki-laki yang banyak mendominasi di legislatif. Dapat dilihat bahwasanya keterwakilan perempuan di DPRD seluruh wilayah Sumatera Barat masih kurang dari 30%. Fenomena ini tentunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena keterwakilan perempuan tidak mencapai 30% sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Dari tabel di atas juga memperlihatkan penurunan caleg perempuan terpilih di beberapa Kabupaten. Namun dari beberapa Kabupaten di atas terlihat bahwa Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yang sangat ekstrim. Terlihat pada tabel bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Solok Selatan sama sekali tidak memiliki anggota legislatif perempuan.Hal ini sangat disayangkan mengingat diperiode sebelumnya DPRD Kabupaten Solok Selatan juga dihiasi oleh keberadaan anggota legislatif perempuan.

Pada saat ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju membuat kemampuan perempuan tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin-pemimpin perempuan yang maju keranah politik, seperti Presiden Indonesia Mega Wati, Susi Pudjiastuti selaku Mentri Kelautan dan Perikanan, Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya, dan lainnya. Ketiga perempuan tersebut merupakan beberapa contoh perempuan yang menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia untuk dapat menjadi seorang pemimpin di masa depan.

Kemampuan beberapa perempuan yang saat ini sudah mulai berkembang serta fenomena minimnya perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD membuat peneliti tertarik menganalisis penyebab-penyebab dari kegagalan caleg perempuan. Penelitian-penelitian yang mengkaji penyebab kekalahan caleg dirasa sangat penting adanya, terutama caleg perempuan yang saat ini masih minim keterwakilannya di DPRD.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu diantara 19 Kabupaten / Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Solok Selatan resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten ini lahir dari perjuangan panjang masyarakat Solok Selatan untuk membentuk Kabupaten sendiri. Keinginan masyarakat ini didorong oleh hasrat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dekat ke pusat pemerintahan.⁵

Pada tahun 2014 Kabupaten Solok Selatan mengalami fenomena penurun jumlah anggota DPRD perempuan yang sangat ekstrim. Kabupaten Solok Selatan menjadi Kabupaten yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan. Terlihat pada tahul 1.1 bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Solok Selatan sama sekali tidak memiliki anggota legislatif perempuan. Hal ini sangat disayangkan mengingat diperiode sebelumnya DPRD Kabupaten Solok Selatan juga dihiasi oleh keberadaan anggota legislatif perempuan.

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 Kabupaten Solok Selatan memiliki dua wakil perempuan di DPRD yaitu Yunastri yang diusung oleh partai

⁵Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. *Sekilas Solok Selatan*. dalam (http://www.solselkab.go.id/post/read/154/sekilas-solok-selatan.html), diakses pada 15 Januari 2016,

pukul 18:12 WIB

Golkar dan Ria Anggraini yang diusung oleh partai PAN.⁶ Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat Kabupaten Solok Selatan khususnya kaum perempuan sebelumnya memiliki kepercayaan terhadap caleg perempuan walaupun belum sepenuhnya mereka memiliki pandangan yang sama.

Pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Solok Selatan, juga diwarnai dengan keikutsertaan para caleg perempuan dalam pileg, bahkan jumlah caleg perempuan yang ikut serta di Kabupaten Solok Selatan terbilang sudah cukup banyak. Fenomena ini didukung oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan dalam pasal 53 sampai pasal 58 yang diterapkan oleh pemerintah. Banyaknya perempuan yang ikut serta dalam pemilihan legislatif di Kabupaten ini dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di tiap-tiap partai yang ikut serta dalam pemilihan legislatif itu sendiri.

Tabel 1.2 Jumlah Caleg Perempuan Berdasarkan Partai pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014

Nama Partai	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Jumlah
NASDEM	KEBONO	AAN3 BA	NGS 2	8
PKB	3	4	3	10
PKS	3	4	3	10
PDIP	2	3	-	5
GOLKAR	3	4	3	10
GERINDRA	3	4	3	10
DEMOKRAT	3	4	3	10
PAN	3	4	3	10
PPP	2	3	3	8
HANURA	2	3	2	7
PBB	2	4	1	7

⁶Jariungu.com. DPRDSolok 2009-2014. Anggota Kabupaten Selatan Periode (http://www.jariungu.com/parlemen profil.php), diakses pada 20 Agustus 2015, pukul 20.30 WIB

Sumbe	PKPI	3	3	2	8
	Jumlah	32	43	28	103
T					

KPU Kabupaten Solok Selatan

Melihat dari tabel di atas senang rasanya setiap partai telah mengikutsertakan kaum perempuan dalam pemilu legislatif pada tahun 2014. Namun setelah melihat hasil akhir dari pemilihan Legislatif di Kabupaten ini sangat berbanding terbalik dari yang diharapkan. Pada tahun 2014 ini, terjadi penurun keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Solok Selatan dari pemilihan anggota legislatif periode sebelumnya. Jika di periode sebelumnya terdapat perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD maka ditahun 2014 justru tidak ada sama sekali perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD. Hal ini didukung dari pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan yang menyebutkan tidak ada wakil perempuan yang terpilih untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat periode 2014-2019 berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2014.

Melihat fenomena yang terjadi pada pileg di Kabupaten Solok Selatan tahun 2014, peneliti tertarik untuk meneliti penyebab kegagalan dari caleg perempuan pada pileg di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014. Untuk itu peneliti membagi tiga kategori untuk melihat kegagalan caleg perempuan dalam pileg di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014. Pengkategorian caleg perempuan ini ditentukan berdasarkan

KEDJAJAAN

⁷AntaraNews.com. *DPRD Solok Selatan Tanpa Wakil Perempuan.*(http://sumbar.antaranews.com/berita/95213/dprd-solok-selatan-tanpa-wakil-perempuan.html), diakses pada 1 Desember 2015, pukul 13.16 WIB

-

pengalaman mereka yang ikut dalam pileg secara langsung. Berikut tiga kategori yang peneliti pilih :

- Peneliti memilih caleg perempuan yang *incumbent*, dimana caleg *incumbent*merupakan caleg yang sebelumnya telah terpilih menjadi anggota DPRD dan
 kemudian ikut kembali dalam pileg berikutnya.
- 2. Peneliti memilih caleg perempuan yang sudah dua kali mengikuti pileg namun tidak terpilih menjadi anggota DPRD.
- 3. Peneliti memilih caleg perempuan pemula yang merupakan caleg perempuan yang memiliki pengalaman pertama kalinya untuk mengikuti pileg.

Dari tiga kategori di atas, peneliti berharap kegagalan caleg perempuan dapat terjawab melalui perwakilan ditiap-tiap kategori di atas. Berikut daftar tabel dan perolehan suara caleg perempuan yang kalah :

Tabel 1.3
Daftar caleg Dapil 2 dan Perolehan Suara

No	Nama Caleg KEDJ	A J Nomor	Partai	Jenis	Peroleh
	WTUK KEDO	Urut	Partai SA BANGSA	Kelami	an
		4		n	Suara
1	NOVIAR, ST DT.RJ ENDAH	1	NasDem	L	996
2	RAYMOND	2	NasDem	L	984
3	DESI NATALIA, S.Kom	3	NasDem	P	50
4	Drs. WAFDI	4	NasDem	L	391
5	ALYUNIR	5	NasDem	L	17
6	MULYANA, S.TP	6	NasDem	P	34
7	Drs. AHMAD JALIUS	7	NasDem	L	93
8	PEFRIAN JONI	8	NasDem	L	267
9	GESNITA	9	NasDem	P	18
10	RAMILUS, A.Md Kep	10	NasDem	L	252
11	MUKHLIS, ST.,S.Pd	1	PKB	L	1.932
12	RAMADAN	2	PKB	L	626
13	HUSNI NILAWATI, S.Pd	3	PKB	P	29

14	ERI SUSWANTO	4	PKB	L	99
15	OKBER DONDA	5	PKB	L	254
16	ZAHARA	6	PKB	P	28
17	IKHSANUL BAHREIN, A.Md	7	PKB	L	401
18	YENDRA NITA	8	PKB	P	6
18	RITA PERMATA SARI	9	PKB	P	9
20	DIA FENI GUSWANDI	10	PKB	L	125
21	TUNUT, A.Md	11	PKB	L	195
22	SRI MUNARTI, SP	1	PKS	P	331
23	NOFRI DELWAN	2	PKS	L	230
24	RUSDI KATIK MARAJO, S.Hi., SH	3	PKS	L	642
25	UPI WAHYUNI, SE	4	PKS	P	81
26	WAHYUDI, SE	5	PKS	L	263
27	DATE DATE AND A CALLED OF THE COLUMN TO THE			L	203 49
28	INDRA REFJUNITA	C 6 XII	PKS	P	109
29	BETRI KELA <mark>NA</mark>			L	
		8	PKS		769
30	Drs. ARIJON	10	PKS	L L	111
31	SAMSUAR		PKS		58
32	SEKRI NOVIANTI	11	PKS	P	20
33	YENI NOVITA, SE	1	PDIP	P	524
34	YONDRI NALDI, SE	2 3	PDIP	L	194
35	YUNNEDI		PDIP	L P	150
36	Hj. SRI NILAWATI	4	PDIP		38
37	SYAFRUDIN MALIK, BA	5	PDIP	L	65 50
38	ROZA AGUS SETIAWAN	6	PDIP	L	58
39	JARNELLY	7	PDIP	P	15
40	H. MUS YANUAR MUSA, BA	1	GOLKAR	L	191
41	H. SYUKRIAL SYUKUR DT. MAJO	2	GOLKAR	L	517
40	BASA	2	COLIZAD	II.	C 40
42	YUNASTRI, SH	3	GOLKAR	P	649
43	YESI MORINA	4	GOLKAR	P	76
44	DEFI FADLI, A.Md	5	GOLKAR	L	281
45	ANDI SURY <mark>ADI</mark>	6	GOLKAR	L	110
46	YANUAR EDRI	7	GOLKAR	L	133
47	YON KARNEDI DT. RAJO MULIA	8	GOLKAR	,L	912
48	ENNA YONINDA	9	GOLKAR	P	4
49	ADRA SURIANTO	10		L	969
50	IDA ZURAIDA, A.Md	11	GOLKAR	P	10
51	ARMEN SYAHJOHAN	1	GERINDRA	L	1.557
52	ALWIS, S.Ag	2	GERINDRA	L	566
53	YULISMA	3	GERINDRA	P	272
54	JASMAN DT. SAMPONO BASAU	4	GERINDRA	L	534
55	M. YASIN, BA	5	GERINDRA	L	54
56	MULYANI	6	GERINDRA	P	266
57	ERMAN, ST DT. MAJOLELO NAN	7	GERINDRA	L	397
~ ~	SALASAI		CERTIFICATION .		0.7
58	HENDRI EDISON	8	GERINDRA	L	85
59	ESTY GUSWARDA YENI, S.PdI	9	GERINDRA	P	4
60	PERIJON EKA PUTRA	10	GERINDRA	L	194
61	HARTATI, S.S	11	GERINDRA	P	6
62	Dra. NURMAILIS	1	DEMOKRAT	P	779

63	ALBERT ARIFIN	2	DEMOKRAT	L	980
64	AKBP (Purn) BUSTAMI. B	3	DEMOKRAT	L	59
65	YENO FRIDA	4	DEMOKRAT	P	66
66	YONKI VALENTINO, A.Md	5	DEMOKRAT	L	39
67	EFRIYON	6	DEMOKRAT	L	383
68	HASINAH, S.Pt	7	DEMOKRAT	P	21
69	ANDRI YOSAN, S.S	8	DEMOKRAT	L	19
70	ARPAN ALI	9	DEMOKRAT	L	569
71	RIRIN RIMA PUTRI, SH	10	DEMOKRAT	P	110
72	SALMAN	11	DEMOKRAT	L	334
73	EDI SUSANTO, SE	1	PAN	L	2.642
73 74	YENDRI SUSANTO	2	PAN	L	1.121
75	NETA WINOVA, A.MG	3	PAN	P	28
76	NOFRI YENDRI	4	PAN	L	1.188
77	Drs. OP BISMARK, MM	5	PAN	L	221
78	MISNI ARWATI	6	PAN	L	10
78 79	EDWIN YESOF, S.Ag	7	PAN	L	44
80	EMRADANI H. DT. RAJO ACE	8	PAN	L	158
81	SUSI LASTRI	9	PAN	P	20
82		10	PAN	L	153
83	MUDARISMAN, SH SUSILA YEMITA	11	PAN	P	24
84	AFRIZAL DT. RJ. JALIL	1		L	956
85	ARISAL DI. RJ. JALIL ARISAL, SH	2	PPP PPP	L L	936 145
		3	PPP	P	
86	YESI NOFITA WATI	4			105
87 88	MON NOFRIZHAL DODI PUTRA	5	PPP PPP	L L	1.265
89		6	PPP	P	130 31
	SYAFRAINI NUR	7	PPP	L	
90	RAFLIUS MEGA, A.Md	8			32
91 92	ZULKHAIRI, SE	9	PPP PPP	L P	371 14
93	LIRA DESMAWATI, S.Pd	10			186
93 94	WAHYU HIDAYAT, A.Mk		PPP	L L	
	AFDAL, SH	1 2	HANURA		798
95	SYAFRIAL NILA WATI	3	HANURA	L P	156
96 97	YANDRI SAPUTRA	3 4	HANURA HANURA	L	25 22
97 98	ARIZAL	5	HANURA	L L	628
99	ERMA WITA	6	HANURA	P	6
	ENDRI ALAMSYAH	7	HANURA	L	234
100 101	MURSYAL	8	HANURA	L	25 4 37
	SOLTRIA FITRI ZEN	9		P	
102			HANURA	_	10 69
103 104	PURBO PRIMARDITO A. TARMUZI	10	HANURA PBB	L	404
		1 2		L L	40 4 74
105	ANDISON SVAENETI DONA S ID	3	PBB	P	16
106	SYAFNETI DONA, S.IP JONI PARIZAL	4	PBB PBB		495
107		5		L	
108 109	ILYAS FITRAWATI	6	PBB PBB	L P	543 3
		7			
110	ERIVA'I NATALIZA		PBB PBB	L L	100 38
111	ENI MURNIATI	8			
112 113	MARGONO	10	PBB PBB	P L	46 39
113	MINIOUNU	10	ממז	L	37

114	RESNIWATI	11	PBB	P	2
115	NOVIARDI SALTA	1	PKPI	L	96
116	NELLIYARTI ABBAS	2	PKPI	P	47
117	APRI NOPENDI, S.Hi	3	PKPI	L	187
118	KAMAL AZHAR	4	PKPI	L	24
119	WELI AFNI LOSA HARA, S.Sos	5	PKPI	P	6
120	YUL ANSISMEN, ST	6	PKPI	L	393
121	OKTAFIANA	7	PKIP	P	2
122	ANDRA MARLIUS	8	PKPI	L	165
123	ALFIAN	9	PKPI	L	6
124	MUNASRI DT. RAJO IMAM	10	PKPI	L	80

Sumber: dimodifikasi oleh peneliti dari KPU Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan tabel di atas maka peneliti memilih Yunastri untuk mewakili dari kategori *incumbent*. Pemilihan Yunastri dalam kategori ini, dikarenakan Yunastri satu-satunya caleg perempuan yang pernah terpilih menjadi anggota DPRD kemudian mengikuti Pileg kembali di tahun 2014. Selanjutnya kategori caleg perempuan dua kali mengikuti Pileg yaitu Nurmailis. Pemilihan Nurmailis dalam kategori ini karena Nurmailis sudah pernah mencalonkan diri di Pileg 2009 sebelumnya, kemudian mencalon kembali di Pileg 2014. Selain itu Nurmailis merupakan caleg perempuan yang mendapatkan suara tertinggi pada Pileg 2014 di Kabupaten Solok Selatan.

Kategori yang terakhir yaitu caleg perempuan pemula, dalam kategori ini peneliti memilih Yulisma sebagai caleg perempuan pemula. Pemilihan Yulisma dikategori ini karena Yulisma merupakan caleg perempuan yang baru mengikuti pileg pada tahun 2014. Selain itu, sebagai pemula Yulisma memiliki jumlah suara yang didapatkan Yulisma cukup tinggi dibandingkan dari caleg perempuan pemula lainnya. Keaktifan Yulisma di berbagai organisasi seperti PKK, Darma Wanita, dan juga HIMPAUDI juga menjadi salah satu pertimbangan peneliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa penting menganalisis penyebab kekalahan caleg perempuan, untuk itu peneliti merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan: "Mengapa Caleg Perempuan Gagal dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Dapil II, Kabupaten Solok Selatan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dari kegagalan caleg perempuandalam Pileg tahun 2014 di Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khusunya para kaum intelektual yang ingin mengkaji tentang disiplin ilmu politik. Pertama yaitu manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu politik, khusunya pada pembahasan mengenai faktor kegagalan caleg perempuan. Selain itu manfaat yang kedua adalah secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para calon anggota legislatif perempuan dalam menyusun strategi politik agar dapat mengambil hati masyarakat. Manfaat yang terakhir adalah manfaat sosial yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan kepada partai politik dalam mengusung caleg perempuan dalam Pileg.